



NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6080-6090

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Maryam Batubara^{1✉}, Febriyani Natari Manik²

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: maryam.batubara@uinu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab pemerintah yang berusaha melakukan penerbitan dan mensejahterakan masyarakat tanggungjawab pemerintah dalam perspektif islam memiliki fleksibilitas yang luas di dasarkan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Tanggungjawab pemerintah dalam Perspektif islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa islam bertujuan untuk mensejahterakan pada masyarakat umum. Dalam perekonomian adalah mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan dan mematok harga kalau dibutuhkan. Maka islam menghendaki terbentuknya satu negara dan sistem pemerintahan didalamnya.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Negara, Peran Pemerintah*

Abstract

In people's lives, it cannot be separated from the responsibility of the government which strives for the welfare and welfare of the community. Government responsibilities in an Islamic perspective have broad flexibility based on the general welfare of society. Government responsibility in an Islamic perspective has broad flexibility based on the idea that Islam aims to prosper the wider community. In the economy is to monitor the main factors driving the economy, stop muamalah which is forbidden and set prices when necessary. So Islam wants the formation of a state and a system of government in it.

Keywords: *Islamic Economics, State, Role of Government*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan sesama masyarakat. Prinsip keadilan harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat yang meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik hingga ekonomi. Dalam pondasi ekonomi islam, keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian dalam suatu negara salah satunya keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antar sesama umat manusia didalam suatu negara.

Beberapa fungsi mutlak yang harus nampak dalam diri pemimpin sebuah negara diantaranya : mengatur ketertiban umum dalam rangka mencapai visi dan misi bersama, membangun sebuah keharmonisan seluruh elemen lapisan masyarakat, menjamin kehidupan rakyat dan membangun kekuatan internal bangsa serta menjamin akan tegaknya suatu keadilan tanpa pandang bulu. Berdasarkan fakta sejarah yang kemudian banyak di benarkan oleh seluruh pakar sejarah bahwa sosok yang hingga saat ini paling berpengaruh dalam memberikan warna baru tentang konsep suatu pemerintahan.

Pemerintahan dalam islam merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat hari ini banyak negara yang dengan segala banyak kelebihan dan kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan dapat dengan mudah untuk diterapkan dengan adanya Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat.

Dalam ekonomi islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan dalam ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab pemerintah agar dapat mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif islam negara dapat mendefenisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.

Menurut M. Nejarullah Siddiqi, ada beberapa fungsi negara dalam perspektif islam yang terdiri dari :

1. Fungsi turunan berbasis syariah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu.

- a. Konservasi
 - b. Penelitian
 - c. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum
 - d. Peningkatan modal dan pembangunan ekonomi
2. Tugas-tugas yang secara lugas ditugaskan oleh Syariah yaitu :
- a. Pertahanan
 - b. Hukum dan ketertiban
 - c. Kebenaran
 - d. Pemenuhan
 - e. Dakwah
 - f. Pemenuhan kewajiban sosial.

3. fungsi yang ditugaskan pada saat yang sama didasarkan pada proses konseling (syara), yang mencakup semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada proses Syura. Dan menurut Siddiqi, semua proses menggunakan cara terbuka atau bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing pada suatu negara.

Menurut islam, negara yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Adapun dalam negara yang memiliki kegiatan ekonomi pada awal Islam sangat kurang karena kegiatan ekonomi masih sederhana karena kemiskinan lingkungan dimana Islam muncul.

B. PERAN PEMERINTAH EKONOMI ISLAM

Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh adam

Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi :

1. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan
2. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti bendungan dll.

Hal ini akan tergambar pada kebijakan yang dikeluarkan dalam mengelola perekonomian dalam suatu negara. Ada tiga sistem ekonomi yang di kenal di dunia, yaitu Sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi islam

1. Sistem Ekonomi Sosialis

Akibat dari paham kapitalis yang cukup perannya yang sangat dominan dengan tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu yang melaikan semuanya untuk kepentingan bersama sehingga tidak diakuinya kepemilikan atau kekayaan pribadi dengan ini paham sosialis yang merupakan paham dengan penggerak menuju paham komunis.

Peran Negara dalam sistem ekonomi sosialis :

- a. Negara mengatur semua dalam kebijakan pemerintahan dari segi kebijaksanaan ekonomi.
- b. Pemerintah juga bertindak aktif dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
- c. Negara juga memiliki peran untuk mengendalikan harga-harga dan penyaluran barang.

2. Sistem Ekonomi Kapitalis

Berbeda dengan sistem sosialis, sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialis, dimana negara tidak mempunyai peranan utama atau terbatas dalam perekonomian. Sistem ini sangat berkaitan dengan mekanisme pasar. Pada sistem ekonomi kapitalis negara memiliki 3 peranan yang merupakan peran yang menurut Adam Smith dengan peranan terbatas tersebut optimalisasi kesejahteraan individu pada lingkungan mikro dan negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai pada 3 peran tersebut. Peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus bertindak adil.

- a. Harus adanya pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- b. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
- c. Dibutuhkannya kekuasaan diluar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan

senantiasa bertindak adil.

3. Sistem ekonomi Islam

Sudah ada jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu pada abad ke 6, sedangkan kapitalis abad 17, dan sosialis abad 18. Dalam sistem ekonomi Islam, yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Selain itu negara berperan sebagai Pengawas (hisbah), yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas. Dalam Islam kepemilikan pribadi juga diakui, namun terhadap setiap umat Islam yang mempunyai penghasilan yang mencukupi (memenuhi hisab), sebagian dari hartanya adalah milik orang-orang yang tidak mampu (zakat). Dalam Islam pilar yang menjadi etika ekonomi yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya adalah tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan. Dalam memecahkan permasalahan perekonomian, berdasarkan fakta hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Dalam sistem ekonomi Islam Negara memberikan kebebasan dalam beraktivitas dalam perekonomian selain itu Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Menurut Monzer Khaff, yang menjadi keterbatasan negara saat ini dalam menerapkan sistem negara Islam adalah kurangnya komitmen terhadap syariah, dan kurangnya komitmen terhadap shura (proses musyawaran untuk mufakat). Tetapi menurut Ibnu Khaldun, keruntuhan dan kejayaan suatu dinasti tidak hanya tergantung pada variabel-variabel ekonomi namun tergantung dengan sejumlah faktor yang menentukan kualitas perorangan, masyarakat, pemerintahan dan Negara. Hal-hal yang harus dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian Islam adalah:

1. Memajukan sektor swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum
2. Sumber daya alam dikelola secara bersama, di mana pengelola menyewa lahan kepada umum
3. Kebijakan investasi secara langsung
4. Proyek yang dikerjakan oleh individu, tetap dapat dinikmati oleh orang banyak
5. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi
6. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang
7. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi

C. FUNGSI NEGARA ISLAM

Di antara beberapa fungsi negara dalam Islam adalah sebagai berikut: Fungsi memberikan keamanan dan pertahanan, Fungsi penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengannya, Fungsi ekonomi dan keuangan, dan sarana yang terkait dengannya Urbanisasi tercapai dan penghidupan masyarakat tersedia, Solidaritas sosial, perlindungan dakwah yang bersumber dari akidah Islam dan moral, Amar ma'ruf dan nahi munkar, yang merupakan landasan menyeluruh yang menjadi dasar shalat Agama dan urusan duniawi dan Fungsi pelayanan publik, meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pendidikan dan lain sebagainya.

D. PRINSIP-PRINSIP DASAR NEGARA ISLAM

Ada landasan akidah, organisasi atau legislatif untuk berdirinya negara dalam Islam, yaitu sebagai berikut :

Landasan Keyakinan dan Tujuan Umum Landasan keyakinan untuk pendirian negara dalam Islam menjadikan aktivitas politik seorang Muslim sebagai misi dan amanah yang harus dipenuhi dengan baik. Yang paling penting dari fondasi ini adalah:

1. Semua manusia, tanpa memandang bahasa, warna kulit, dan status sosialnya, adalah hamba Tuhan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal harkat dan martabat manusia. Apa yang mereka miliki adalah titipan dari Allah SWT. karena itu hanya milik Allah swt. oleh karena itu, rakyat, penguasa dan yang diperintah adalah sama di mata Syariah, jadi tidak ada hak satu sama lain, dan masing-masing bertanggung jawab atas pekerjaannya.
2. Hubungan antara penguasa dan yang diperintah bukanlah hubungan ketaatan yang mutlak, melainkan hubungan yang dibatasi dalam batas-batas Syariah. Sudah sebuah keniscayaan tunduk pada pengawasan dan pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan Syariah, dan karenanya tidak ada hak istimewa atau kedudukan dalam Islam, dan setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab atas umatnya.
3. Penguasa adalah pelaksana syariat dan bukan perancang syariat, dan jika ada hal-hal ijtihad yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka penguasa tidak bisa sendirian dalam ijtihad atau menzalimi dengan pendapatnya. Jika ada beberapa pendapat ijtihad, maka syura dipisahkan di antara mereka.
4. Seluruh manusia dalam kemuliaan Allah . sebagai khalifah di muka bumi untuk melaksanakan hukum-Nya, dan Islam yang diturunkan kepada Muhammad adalah utusan Tuhan yang mentranskripsikan semua hukum, dan hubungan antar manusia dalam Islam adalah ikatan persaudaraan. asal-usul, dan mata rantai persatuan dalam

afiliasi dengan pengabdian kepada Allah, dan itu adalah antara Muslim serta ikatan persaudaraan dalam keyakinan.

5. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diberikan oleh Tuhan hak-haknya, termasuk hak untuk hidup dan berkehendak, dan seseorang tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, misalnya, menyalahgunakan kebebasannya. Tidak boleh menyiksa, mencemarkan nama baik, atau menghina dan segala sesuatu yang mempengaruhi martabat manusia, sedangkan hukuman adalah hukuman perdamaian sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka yang mengancam ketertiban masyarakat, keamanannya, dan keselamatannya. hak-hak rakyat di dalamnya.

E. PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

1. Pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto

- prinsip dan konsep umum

Pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto adalah salah satu alat utama yang diandalkan negara dalam menggambar dan menerapkan kebijakannya Ekonomi, dan ada beberapa konsep dasar yang terkait dengan pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto.

Persyaratan pertama: mendefinisikan pengeluaran pemerintah, bentuk, sumber, dan tujuannya Penting untuk mendefinisikan konsep belanja publik dan bentuknya, selain memperjelas sumber dan tujuan belanja pemerintah yang akan dilakukan dan diatur dalam persyaratan ini.

2. Bentuk Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran publik berupa sejumlah uang tunai, dimana negara berperan dalam pengeluaran pemerintah dengan menggunakan sejumlah uang tunai sebagai harga atas apa yang membutuhkan produk, barang dan jasa, untuk menjalankan utilitas publik dan harga untuk modal produktif yang diperlukan untuk melaksanakan proyek investasi dan untuk memberikan bantuan dan subsidi ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan uang oleh negara merupakan hal yang wajar dan sejalan dengan keadaan yang ada dalam perspektif ekonomi moneter. Ini adalah cara negara membelanjakan sesuatu dalam hal individu meskipun pengeluaran publik telah berlangsung lama dalam bentuk natura, seperti negara menyita sebagian harta milik individu, atau Perampasan paksa atas apa yang dibutuhkan dalam hal dana dan produk tanpa memberi kompensasi kepada pemilik dengan kompensasi yang

adil, kecuali bahwa situasi ini telah hilang setelah akhir masa tahap ekonomi sistem barter untuk pertukaran barang.

Pengeluaran tunai adalah salah satu metode pengeluaran publik terbaik yang dilakukan oleh negara, dan ini disebabkan oleh beberapa alasan meringkasnya sebagai berikut :

1. Penggunaan uang negara dalam proses pembelanjaan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh sistem keuangan modern dalam hal konsolidasi prinsip kontrol dalam berbagai bentuknya.

2. Pengeluaran publik

Untuk menjamin penggunaannya yang tepat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang memenuhi kebutuhan publik individu. Pengeluaran dalam bentuk natura menimbulkan banyak masalah administrasi dan organisasi dan menyebabkan pengawasan yang buruk. Individu dan memberi mereka hadiah dalam bentuk barang dengan mengesampingkan orang lain.

3. Menyerap pengeluaran pemerintah

Kami tidak dapat menganggap jumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan layanan tertentu sebagai biaya publik kecuali dikeluarkan oleh orang publik. Untuk orang publik, berarti negara dan divisi politiknya dan kelompok lokal, termasuk badan publik dan institusi dengan kepribadian Entitas moral, dan Amerika Serikat di negara bagian federal, atau mereka mungkin orang publik lokal seperti dewan provinsi, kota dan desa di negara bagian

4. Konsolidasi

Pengeluaran pemerintah Pemenuhan kebutuhan publik, yaitu terwujudnya kepentingan umum masyarakat, di mana anggota masyarakat mendapat manfaat secara umum dari pelayanan yang diberikan. Disediakan oleh pemerintah, karena dana yang menutupi pengeluaran publik ini dikumpulkan dari individu, dan konsep kebutuhan publik bersifat relatif. Ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain sesuai dengan perkembangan peradaban, sosial dan budaya masing-masing masyarakat dan untuk alasan ini saya menyerahkan masalah ini kepada parlemen yang mewakili rakyat untuk membebaskan kebutuhan umum rakyat agar tidak menyalahgunakan pengeluaran

publik dan menjaga dana publik

Persyaratan ini mengacu pada pembagian ilmiah pengeluaran publik. Divisi ilmiah (ekonomi) dari pengeluaran publik pembagian ekonomi pengeluaran publik tergantung pada tiga kriteria utama yaitu :

a. Kriteria periodisitas (pengulangan)

Berdasarkan kriteria periodisitas, dimungkinkan untuk membedakan antara dua

b. jenis pengeluaran publik:

Pengeluaran publik berkala: Pengeluaran yang bersifat berulang-ulang dan didominasi oleh sifat permanen, dan termasuk dalam penyelenggaraan fasilitas.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan: maka dapat di ambil kesimpulan Peran negara dalam ekonomi ditentukan dari sistem perekonomian dan sistem pengelolaan ekonomi yang mereka gunakan. Dalam sistem ekonomi sosialis negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Dalam sistem ekonomi kapitalis negara tidak mempunyai peranan utama atau terbatas dalam perekonomian.

Islam sangat memperhatikan pemerintahan, dalam islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial. Tentunya untuk menerapkan aturan-aturan yang ada mestilah di bentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Maka islam menghedaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Adapun tujuan dari Negara Islam dan Pemerintahan dalam Islam yaitu agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemadhorotan termasuk dalam tujuan Negara dalam Islam yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid al-Jabiri Muhammad , Agama Negara dan Penerapan Syariah, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)
- Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.647>
- Hughes, R. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Praktiknya. *Journal of Chemical Information and Modelling*.
- Ismail Nawawi, "Ekonomi Islam "Persepektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum", (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009) hal 182
- Karim Boudkhed, Dampak Kebijakan Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus Aljazair, 2001-2009, Tesis Magister Uang dan Keuangan, Universitas Daly Ibrahim, Aljazair, 2010, S.30
- Karim, Adiwarmar, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press: Jakarta, 2003.
- Mairizal, T. M. (2018). Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3(2), 154.
- Muhammad Abbas Mahrezi, Ekonomi Keuangan Publik, Kantor Pers Universitas, Aljazair, 2003, hal. 68
- Munfaridah, T. (2019). Kepemimpinan dalam Islam. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 121–127. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/1034>
- P3EI, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, h. 449.
- Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press: Jakarta, 2000. yang diterjemahka oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Daurul Qiyam wal Akhlam fil Iqtishadil Islami.
- Rahman,F. (2021). Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. ... PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama ..., 79–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>
- Ramdan, A. M. (2011). KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN.]
KHILAFAH_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_ISLAM
- Sood, M. (2021). *THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARD IN EFFORTS TO PROTECT DOMESTIC INDUSTRIAL PRODUCTS*. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1>
- Sunandar, M. N. (2017). Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.11>

- Syam. (2014). Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam. *Tajdid*, 22, 105–132.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>
- Yusuf, B. (2018). POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik). *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 114– 130.
<https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653>